

Peran ormas Pemuda dalam Pilkada serentak: Mampukah Melahirkan Pemimpin Yang Berkemajuan?

Oleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum.

Guru Besar Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

Universitas Sebelas Maret Solo

Disampaikan dalam Sarasehan atas kerjasama Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah dengan Kesbangpolinmas Jawa Tengah tanggal 21-22 Mei di Hotel Riyadi Palace Solo

Curriculum Vitae



Nama : Prof.Dr.H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Tempat tgl lahir: Magelang 8 Nopember 1962
Tempat tinggal : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
Pendidikan : S1 FH UNS, S2 PPS Undip, S3 UNDIP
Status : BERKELUARGA, 1 istri, 3 anak
HP. : 08122601681
E-mail : jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com
Website : www.jamalwiwoho.com

PEKERJAAN:

DOSEN S1,S2,S3 dan Wakil Rektor II UNS Surakarta

LAIN-LAIN:

Reviewer Penelitian dan Pengabdian DP2M Dikti
Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karang Anyar-
Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan,
Konsultas IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim,
Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll
DOSEN PASCASARJANA DI MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ
Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo,
MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll

Sejarah telah membuktikan bahwa salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi pemudanya. Demikian juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat pemuda merupakan identitas yang potensial dalam masyarakat sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan harapan bangsa, oleh karena itu pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.

Secara kekinian peran pemuda dalam dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah :

1. Memberikan pendidikan dan pemantapan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Berperan aktif dalam pembangunan Masyarakat pada umumnya
3. Sarana untuk berserikat/ berorganisasi guna mengembangkan ide/gagasannya
4. Sarana penyaluran aspirasi dalam pembangunan nasional.

PILKADA SERENTAK

Suatu era baru akan terjadi tahun ini yakni pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya, keberhasilan penyelenggaraan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk peserta pemilu dan ormas pemudanya. Oleh karena itu untuk pelaksanaan pilkada serentak yang diharapkan adanya efisiensi anggaran. Hal itu jika kita perhatikan bahwa penyelenggaraan pilkada yang begitu banyak di Indonesia dinilai sarat dengan pemborosan. Bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah maka kewajiban untuk menyelenggarakan pilkada ternyata sangat mengurangi biaya layanan publik seperti urusan pendidikan dan Kesehatan karena itu penyelenggaraan pilkada serentak lebih hemat dan efisien.

Biaya untuk setiap kabupaten/kota paling sedikit Rp 25 milyar dan untuk pilkada propinsi minimal Rp 100 milyar sehingga untuk melakukan pilkada secara keseluruhan akan memakan biaya Rp 17 triliun dan jika dilaksanakan secara serentak diperkirakan akan memakan biaya Rp 10 triliun. Hal itu tentu lebih hemat dan hanya sekian persen dari APBN

Selama ini biaya pelaksanaan pilkada yang dibebankan kepada APBD, sehingga berpotensi besar bagi pelaku didaerah untuk melakukan politik dan politisasi anggaran. Calon yang sedang memegang kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif di pemerintahan daerah itu akan dapat menggunakan instrumen anggaran pilkada untuk memperkuat posisi tawar politiknya.

Disisi lain ada 3 masalah yang selalu menyertai pencalonan masalah kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pilkada yakni:

1. Adanya politik uang dalam bentuk "mahar" untuk dapat dipinang oleh partai politik atau gabungan partai politik. "Mahar" ini kadang-kadang tidak sebanding dengan dukungan partai dan massa pendukung dalam kampanye maupun hasilnya
2. Terjadi ketegangan bahkan perpecahan di internal parpol akibat tidak adanya kesepakatan pengurus parpol dalam memutuskan dan menentukan siapa yang diajukan dalam pasangan calon akibatnya peran parpol lebih lemah dan tercabik-cabik dalam memperjuangkan aspirasi para anggotanya
3. Pencalonan yang hanya mempertimbangkan pada besarnya "mahar" akan mengecewakan masyarakat karena calon yang diinginkan tidak masuk dalam daftar calon. Hal ini juga mengakibatkan pemilih merasa apatis atas pelaksanaan pilkada sehingga tingkat partisipasi pemilih menjadi rendah atau berkurang.

Aspek penting yang tidak boleh dilupakan adalah menentukan syah tidaknya suatu partai untuk mengajukan siapa calon yang diajukan. Suatu fakta yang sampai hari ini masih menjadi tanda tanya besar manakala suatu partai terdapat dua kepengurusan (dualisme atau kepengurusan ganda) yang mengklaim semua berhak untuk mengusulkan calon-calonnya. Misalnya partai Golongan Karya dengan Ketua Aburizal Bakrie (ARB) atau Agung Laksono (AL) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibawah kepengurusan H.Romahurmuziy (Romi) dan kubu Djan Faridz (DF) yang sampai saat ini masing-masing kubu mengklaim sebagai pengurus yang syah.

Keadaan ini jika tidak diselesaikan dengan baik pasti akan meninggalkan riak dalam perjalanan pendidikan berdemokrasi di Indonesia.

Mampukah melahirkan pemimpin yang berkemajuan?

Belum adanya definisi yang pas untuk istilah "pemimpin yang berkemajuan" setidaknya-tidaknya akan memberikan kesulitan dalam memberikan batasan dan kriteria serta jenis dan kategori pemimpin tersebut. Namun demikian jika hal itu batasan "pemimpin yang berkemajuan" itu disandingkan dengan "pemimpin yang berkualitas" tentu akan berbeda, setidaknya-tidaknya jika didekatkan dengan pengetahuan sistem pemilihan pemimpin di era demokrasi. Sistem pemilihan "pemimpin" dalam era demokrasi hanya menyampaikan tentang banyak-sedikitnya pemilih yang memilihnya sehingga aspek kualitas baik yang dipilih maupun yang memilih itu tidaklah dianggap penting.

Dalam sistem ini maka calon pemimpin yang dipilih banyak oleh pemilihnya akan menjadi pemenangnya tanpa mempertimbangkan aspek aspek kualitatif lainnya, sepanjang sudah memenuhi ketentuan dalam persyaratan formal. Dengan demikian itulah ironi dalam demokrasi yang hanya mempertimbangkan kuantitas semata dalam pengambilan keputusan.

Solo, 21 Mei 2015

Thank You